

*PERUBAHAN*



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA BPKAD)  
TAHUN 2016-2021**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dengan visi **"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia"** maka sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis disusun RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

RENSTRA dimaksud disusun dan memuat uraian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016. Selanjutnya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program tersebut diharapkan masing-masing komponen dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya.

Dengan ditetapkannya Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017-2021, maka selanjutnya dokumen ini menjadi acuan untuk meningkat kinerjanya untuk mencapai sasaran dan target yang harus dicapai selama periode 2016-2021.

Bengkalis, Juli 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS



**AULIA, S.Pi, MT**

Pembina TK. I

NIP. 19701109 199903 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN .....	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	11
a) Tugas dan Fungsi .....	12
c) Struktur Organisasi.....	13
2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. ....	17
2.3 Kinerja Pelayanan .....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	28
a) Tantangan .....	28
b) Peluang.....	28
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	30
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	30
3.3 Analisis Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra BPKAD Provinsi Riau .....	31
3.4 Analisis Terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategi sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPKAD .....	36
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN .....	37
4.1 Visi dan Misi.....	37
4.2 Tujuan dan Sasaran.....	37
BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	40
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	43
6.1 Rencana Program dan Rencana Kegiatan .....	44
BAB VII : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	52
BAB VIII : PENUTUP .....	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Demokratis, Desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan tolak ukur Badan dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Hal ini dimaksud dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah Kabupaten Bengkalis.

Adapun penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) yang berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 dan Pasal 273, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 Tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 Tahun dan RKP Daerah sebagai rencana Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut guna memenuhi semua ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 (lima) tahun sekali;
2. RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan;
3. Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;
4. Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;
5. RKP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun anggaran yang

merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Atas dasar hal tersebut diatas, ada tiga (3) alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :

1. Perencanaan strategis memberikannya kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pengalaman bentuk perencanaan lainnya;
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Standar Akuntansi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 – 2021 adalah :

1. sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. menjabarkan visi, misi dan program yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun mendatang dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan tujuan dalam RPJMD;



3. sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai institusi;
4. sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 – 2021 adalah :

1. meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah dan terkendali untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud bisa mencapai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis telah disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan penyajian sebagai berikut :

## **Bab I : PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Renja SKPD.

### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD serta susunan garis besar isi dokumen

## **Bab II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur dan mekanisme)

## **2.2 Sumber Daya SKPD**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

## **2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **Bab III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

#### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari :

1. gambaran pelayanan SKPD;
2. sasaran jangka menengah Renstra K/L;
3. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
4. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

## **Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN**

### **4.1 Visi dan Misi SKPD**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD.

### **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD dan perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD

### **4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

## **Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan menguraikan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama periode 2017-2021.

**Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif)

**Bab VII : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab VIII : PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) baru terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) sendiri merupakan penggabungan 2 (dua) unit kerja pada Sekretariat Daerah yaitu Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan yang melebur membentuk Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) terbentuk dari penggabungan fungsi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) selain berfungsi sebagai pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas sebagai Penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan daerah dan aset.

2. pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
3. pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah;
4. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

**1. Kepala Badan;**

**2. Sekretariat;**

- a. Sub Bagian Penyusunan Program
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

**3. Bidang Anggaran;**

- a. Sub Bidang Anggaran I
- b. Sub Bidang Anggaran II
- c. Sub Bidang Anggaran III

**4. Bidang Perbendaharaan;**

- a. Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah
- b. Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah
- c. Sub Bidang Manajemen Kas Daerah

**5. Bidang Akuntansi;**

- a. Sub Bidang Akuntansi I
- b. Sub Bidang Akuntansi II
- c. Sub Bidang Akuntansi III

**6. Bidang Aset;**

- a. Sub Bidang Analisa kebutuhan dan Perencanaan Pemeliharaan
- b. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset
- c. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset

**7. Kelompok Jabatan Fungsional**

2. pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
3. pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah;
4. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

**1. Kepala Badan;**

**2. Sekretariat;**

- a. Sub Bagian Penyusunan Program
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

**3. Bidang Anggaran;**

- a. Sub Bidang Anggaran I
- b. Sub Bidang Anggaran II
- c. Sub Bidang Anggaran III

**4. Bidang Perbendaharaan;**

- a. Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah
- b. Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah
- c. Sub Bidang Manajemen Kas Daerah

**5. Bidang Akuntansi;**

- a. Sub Bidang Akuntansi I
- b. Sub Bidang Akuntansi II
- c. Sub Bidang Akuntansi III

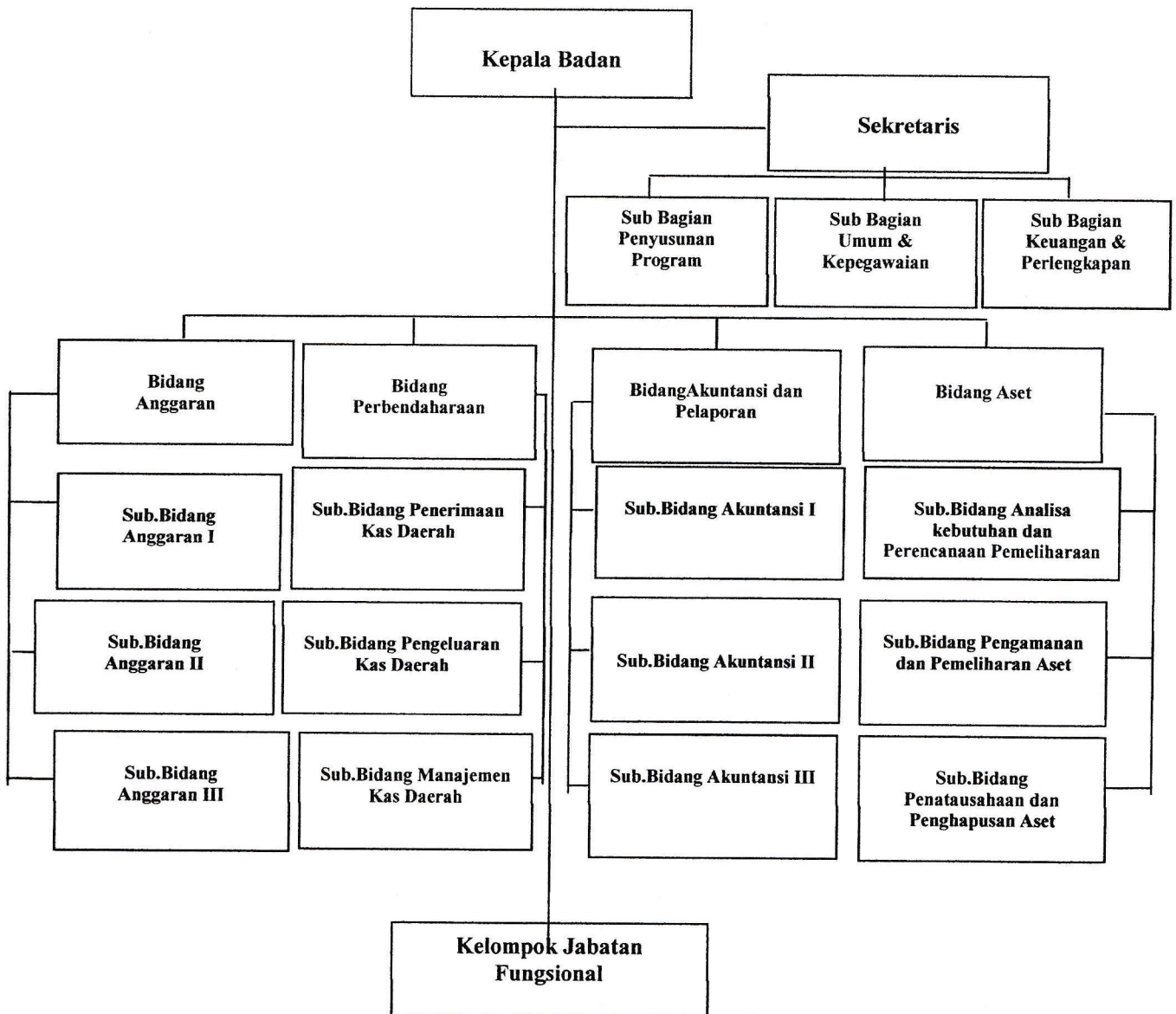
**6. Bidang Aset;**

- a. Sub Bidang Analisa kebutuhan dan Perencanaan Pemeliharaan
- b. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset
- c. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset

**7. Kelompok Jabatan Fungsional**



**Struktur Organisasi  
BPKAD Kabupaten Bengkalis**



Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :

### **1. Kepala Badan**

- a. kepala mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan penunjang pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah dan aset
- c. pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah
- d. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

### **2. Sekretariat**

Mempunyai tugas dan fungsi

1. sekretariat Mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian
2. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program evaluasi dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
  - c. pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
  - d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan urusan organisasi dan hubungan masyarakat
  - f. pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan tugas-tugas bidang dan;
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala.

1. bidang anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
2. bidang anggaran mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi di bidang anggaran.
3. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang anggaran mempunyai fungsi :
  - a. perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran
  - c. pengendalian penyusunan anggaran dan;
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

#### **4. Bidang Perbendaharaan**

Mempunyai tugas dan fungsi :

1. bidang perbendaharaan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi di bidang perbendaharaan.
2. bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan perbendaharaan.
3. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang perbendaharaan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
  - c. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
  - d. pengelolaan piutang daerah;

- e. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan dan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas dan;
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

## **5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

Mempunyai tugas dan fungsi :

1. bidang akuntansi dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
2. bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan.
3. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan prosedur penatausahaan
  - b. penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
  - c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
  - d. pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah dan;
  - e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **6. Bidang Aset**

Mempunyai tugas dan fungsi :

1. bidang aset dipimpin oleh seseorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada badan.
2. bidang aset mempunyai tugas memimpin, merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi di bidang aset.
3. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- b. penyelenggaraan penatausahaan, dan penghapusan barang milik daerah;
- c. penyelenggaraan pemanfaatan, pemindah tanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah
- d. penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan, dan pemeliharaan barang milik Daerah
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang dan keahliannya
2. kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala.
3. jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
4. pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bengkalis perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan asset/sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bengkalis dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas badan berjumlah 83 orang dengan rincian:

**A. Pegawai menurut Golongan/Ruang adalah sebagai berikut:**

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina Tk.I (IV/b)	4
2	Pembina (IV/a)	1
3	Penata Tingkat I (III/d)	4
4	Penata (III/c)	11
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	11
6	Penata Muda (III/a)	21
7	Pengatur Tingkat I (II/d)	5
8	Pengatur (II/c)	19
9	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	5
10	Juru Tingkat (I/d)	1

**B. Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal adalah sebagai berikut:**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S-2 (Pasca Sarjana)	6
2	S-1 (Sarjana)	36
3	D-3 (Diploma Tiga)	7
4	SLTA	30
5	SLTP	1

**C. Pegawai menurut Eselon adalah sebagai berikut:**

No	Eselonisasi	Jumlah (orang)
1	Kepala Badan (Pejabat Tinggi Pratama)	1
2	Sekretaris (Pejabat Administrator)	1
3	Kepala Bidang (Pejabat Administrator)	4
4	Kepala Sub Bagian (Pejabat Pengawas)	15

**2. Sarana dan Prasarana**

Adapun asset/sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kondisi		Ket
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
1.	Roda 4 (empat)	6		
2.	Roda 2 (dua)	15		
3.	Komputer	30		
4.	Printer	45		
5.	Laptop	20		
6.	Mesin Ketik	1		
7.	Mesin Foto copy	6		
8.	Mesin Ketik Elektrik	1		
9.	Meja Rapat	2		

10.	Meja Kerja/Staf	120		
11.	Meja Kursi Tamu	8		
12.	Meja Telepon	2		
13.	Meja Komputer	8		
14.	Meja Eselon II	1		
15.	Meja Eselon III	4		
16.	Meja Eselon IV	15		
17.	Kursi Eselon II	1		
18.	Kursi Eselon III	4		
19.	Kursi Eselon IV	15		
20.	Lemari Besi	10		
21.	Lemari Kayu	20		
22.	Rak Besi	5		
23.		5		
24.	Filing Kabinet	20		
25.	Kipas Angin	7		
26.	AC	25		
27.	Brankas	1		
28.	LCD Proyektor+Attachment	1		
29.	Kamera	1		
30.	Tabung PMK	1		
31.	Papan Visual/SO	1		
32.	Papan Pengumuman	1		
33.	White Board	2		
34.	White Board Elektronik	1		
35.	Werelles	1		
36.	Komputer Mainframe/Server	2		
37.	UPS Stabilizer	10		
38.	Pesawat Telepon	1		
39.	Faximile	1		
40.	Tangga Lipat	1		
41.	Televisi	10		
42.	Gambar Garuda	1		
43.	Korden	8		
44.	Sound System	1		
45.	Kursi Lipat	50		
46.	Lemari Buku untuk arsip dinamis	2		
47.	Camera+Attachment	1		
48.	Kaca Hias	2		
49.	Gucci	1		
50.	Almari Es	5		
51.	Jam Dinding	8		
52.	Kursi Kayu	10		
53.	Almari BPKB	1		
54.	Papan Tanda Kepemilikan Tanah	1		
55.	Dispenser	5		

56.	Penghancur Kertas	10		
57.	Scanner	10		
58.	Mesin Potong Rumput	2		
59.	Trolley	1		
60.	Pompa Air	3		
61.	Meja Kecil/Rak Tv	2		
62.	Kursi Rapat/Putar	30		
63.	Sofa	6		
64.	Ventilator Udara	6		
65.	Microphone Wirelles	1		
66.	Microphone	1		
67.	Stand Microphone	1		
68.	CCTV	3		

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis baru terbentuk pada tahun 2017 dan merupakan gabungan antara Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah sehingga hasil evaluasi kinerja untuk renstra sebelumnya terkait pelayanan dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah belum tersedia. Namun sejak tahun 2013 dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pelaksanaan APBD tahun 2010-2015, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapatkan Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau.



56.	Penghancur Kertas	10		
57.	Scanner	10		
58.	Mesin Potong Rumput	2		
59.	Trolley	1		
60.	Pompa Air	3		
61.	Meja Kecil/Rak Tv	2		
62.	Kursi Rapat/Putar	30		
63.	Sofa	6		
64.	Ventilator Udara	6		
65.	Microphone Wireles	1		
66.	Microphone	1		
67.	Stand Microphone	1		
68.	CCTV	3		

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis baru terbentuk pada tahun 2017 dan merupakan gabungan antara Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah sehingga hasil evaluasi kinerja untuk renstra sebelumnya terkait pelayanan dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah belum tersedia. Namun sejak tahun 2013 dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pelaksanaan APBD tahun 2010-2015, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapatkan Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau.

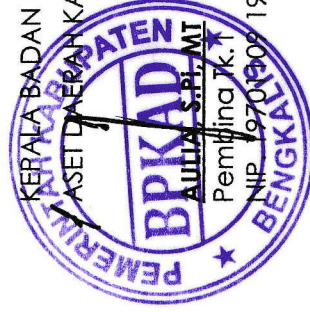
TABEL 2.3

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Lamanya waktu penyusunan RAPD	-	-	-	210 hari	180 hari	180 hari	180 hari	180 hari	210 hari	180 hari	180 hari	180 hari	180 hari	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kesesuaian PPAS dengan RKPD	-	-	-	85%	90%	95%	100%	100%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rata-rata waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara	-	-	-	3 Hari	2,5 Hari	2 Hari	1 Hari	1 Hari	3 Hari	2,5 Hari	2 Hari	1 Hari	1 Hari	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	76%	77%	78%	79%	80%	76%	77%	78%	79%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Peningkatan Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Aset yang tercatat dalam Sistem secara	-	-	-	72%	74%	76%	78%	80%	72%	74%	76%	78%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Aset yang digunakan (bertungsi)	-	-	-	62%	64%	66%	68%	70%	62%	64%	66%	68%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD	-	-	-	50%	60%	70%	80%	90%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Temuan Inspektorat / BPK yang Difindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Bengkalis, Juli 2019

KERALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASSET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



NIP. 197013081999031005

Kegiatan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan daerah meliputi Persentase kualitas penyusunan APBD/APBD-P sesuai ketentuan yang berlaku, Persentase kualitas penatausahaan APBD/P sesuai ketentuan yang berberlaku, Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku, Persentase Laporan Keuangan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Standar Akuntansi, Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Pedoman Evaluasi, dan Persentase Kab/Kota yang Pengelolaan Keuangan dan Asetnya baik. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, dan yang resmi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada awal tahun anggaran 2017 bersamaan dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Berikut hasil evaluasi kinerja BPKAD Tahun 2017 - 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut :



Belanja jasa operator/teknisi dan sejenjannya	296.550.000,00	-	-	296.550.000,00	-	-	100,00	0,00
Belanja jasa transportasi	74.700.000,00	74.700.000,00	41.178.704,00	45.138.900,00	-	-	60,02	55,13
Belanja jasa akomodasi	18.604.000,00	52.420.000,00	10.342.000,00	16.756.900,00	-	-	55,59	31,97
Belanja jasa pengangkutan dan pemindahan barang	39.600.000,00	-	-	39.300.000,00	-	-	99,24	0,00
Belanja jasa perawatan kesehatan	30.200.000,00	12.200.000,00	6.230.000,00	27.200.000,00	-	-	90,07	51,07
Belanja jasa pelatihan	16.000.000,00	40.000.000,00	-	10.443.000,00	-	-	65,27	0,00
Belanja jasa inisiatif	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00	-	-	100,00	0,00
Belanja jasa keamanan harian	115.200.000,00	-	-	115.200.000,00	-	-	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.109.800.000,00	1.935.700.000,00	1.561.100.000,00	1.109.800.000,00	-	-	100,00	80,65
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak	47.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Belanja Premi Asuransi	853.129.000,00	600.000.000,00	595.963.160,00	841.110.650,00	595.963.160,00	-	98,59	99,33
Belanja Premi Asuransi Barang Milk Daerah	853.129.000,00	600.000.000,00	595.963.160,00	841.110.650,00	595.963.160,00	-	98,59	99,33
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	486.070.600,00	685.000.000,00	500.002.973,00	326.346.306,00	-	-	67,15	72,99
Belanja Jasa Service	56.250.000,00	35.500.000,00	34.138.887,00	46.250.493,00	-	-	82,22	96,17
Belanja Penggantian Suku Cadang	110.000.000,00	109.500.000,00	103.929.367,00	109.069.500,00	-	-	99,15	94,91
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	-	80.000.000,00	73.215.000,00	-	-	-	-	91,52
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	309.770.600,00	230.000.000,00	133.496.520,00	170.501.313,00	133.496.520,00	-	55,04	58,04
Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	10.000.000,00	230.000.000,00	155.222.999,00	525.000,00	-	-	5,25	67,49
Belanja Cetak dan Pengandaan	1.982.756.150,00	2.491.703.200,00	2.114.212.070,00	1.562.421.340,00	-	-	80,01	84,65
Belanja cetak	1.779.830.300,00	2.103.300.500,00	1.748.771.070,00	1.468.975.840,00	-	-	82,54	83,07
Belanja Pengandaan	172.925.850,00	388.402.700,00	365.441.000,00	93.425.500,00	-	-	54,03	94,58
Belanja Sewa Rumah/Gedung /Gudang/Parkir	269.564.000,00	220.750.000,00	160.950.000,00	228.840.000,00	-	-	84,89	72,91
Belanja sewa gedung/ kantor /tempat	190.564.000,00	150.500.000,00	135.000.000,00	173.890.000,00	-	-	91,25	89,70
Belanja sewa ruang rapat/peremuan	79.000.000,00	70.250.000,00	25.950.000,00	54.950.000,00	-	-	69,56	36,94
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	64.185.000,00	50.000.000,00	49.700.000,00	64.185.000,00	-	-	100,00	99,40
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	64.185.000,00	50.000.000,00	49.700.000,00	64.185.000,00	-	-	100,00	99,40
Belanja Sewa Alat Berat	199.700.000,00	200.000.000,00	199.630.000,00	199.700.000,00	-	-	100,00	99,82
Belanja sewa Eskavator	199.700.000,00	200.000.000,00	199.630.000,00	199.700.000,00	-	-	100,00	99,82
Belanja Makanan dan Minuman	1.619.025.000,00	2.365.947.000,00	2.143.950.794,00	1.483.412.000,00	-	-	91,62	90,62
Belanja makanan dan minuman rapat	254.200.000,00	268.302.000,00	192.219.794,00	192.450.000,00	-	-	75,71	71,64
Belanja makanan dan minuman tamu	35.000.000,00	36.650.000,00	33.950.000,00	35.000.000,00	-	-	100,00	92,63
Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.329.825.000,00	2.060.995.000,00	1.917.781.000,00	1.255.962.000,00	-	-	94,45	93,05
Belanja Pakalan kerja	21.000.000,00	-	-	20.960.000,00	-	-	99,81	0,00
Belanja pakaian kerja lapangan	21.000.000,00	-	-	20.960.000,00	-	-	99,81	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	6.362.098.100,00	8.613.801.900,00	7.784.251.441,00	5.599.188.056,00	-	-	86,01	90,37
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	712.760.000,00	1.209.670.000,00	697.014.681,00	435.708.000,00	-	-	61,13	57,62
Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.649.318.100,00	7.404.131.900,00	7.087.236.760,00	5.163.480.056,00	-	-	91,40	95,72
Belanja Pemeliharaan	119.588.800,00	-	-	119.375.000,00	-	-	99,82	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	119.588.800,00	-	-	119.375.000,00	-	-	99,82	0,00
Belanja Jasa Konsultansi	987.015.000,00	250.000.000,00	199.170.000,00	71.606.1000,00	-	-	72,55	79,67
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	802.375.000,00	100.000.000,00	99.470.000,00	641.421.000,00	-	-	79,94	99,47
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49.940.000,00	-	-	49.940.000,00	-	-	100,00	0,00

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	24.700.000,00	-	-	24.700.000,00	-	100,00	0,00
Belanja jasa konsultansi bimbingan	60.000.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00
Belanja jasa konsultansi penilaian	50.000.000,00	150.000.000,00	-	-	99.700.000,00	0,00	66,47
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.669.450.000,00	1.366.000.000,00	-	1.588.741.600,00	1.322.297.000,00	95,17	96,80
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	1.143.000.000,00	1.366.000.000,00	-	1.066.344.000,00	1.322.297.000,00	93,29	96,80
Belanja bimbingan teknis	526.450.000,00	-	-	522.397.600,00	-	99,23	0,00
Honorarium PNS	3.444.325.000,00	3.828.500.000,00	-	3.394.800.000,00	3.779.000.000,00	98,56	98,71
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.347.500.000,00	3.728.500.000,00	-	3.303.750.000,00	3.685.100.000,00	98,69	98,84
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	24.280.000,00	-	-	20.000.000,00	-	82,37	0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.745.000,00	-	-	50.000.000,00	-	98,53	0,00
Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan	-	100.000.000,00	-	-	93.900.000,00	-	93,90
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK)	21.800.000,00	-	-	21.050.000,00	-	96,56	0,00
Honorarium Non PNS	4.770.300.000,00	5.158.924.600,00	-	4.523.199.600,00	4.945.950.000,00	94,82	95,87
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.789.800.000,00	5.158.924.600,00	-	4.512.699.600,00	4.945.950.000,00	94,81	95,87
Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	10.500.000,00	-	-	10.500.000,00	-	100,00	#DIV/0!
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>20.048.137.000,00</b>	<b>13.896.428.000,00</b>	<b>13.896.428.000,00</b>	<b>16.591.384.050,00</b>	<b>12.423.460.175,00</b>	<b>82,76</b>	<b>89,40</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.948.137.000,00	13.148.428.000,00	-	16.504.763.050,00	11.991.729.175,00	82,74	91,20
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	-	193.600.000,00	-	-	192.900.000,00	-	99,64
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	-	193.600.000,00	-	-	192.900.000,00	-	99,64
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	17.419.600.000,00	10.995.000.000,00	-	15.941.238.050,00	9.997.222.175,00	91,51	90,93
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor	16.003.100.000,00	10.795.000.000,00	-	14.645.705.550,00	9.843.260.500,00	91,52	91,18
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	916.500.000,00	200.000.000,00	-	837.050.000,00	133.961.675,00	91,33	76,98
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Empat	500.000.000,00	-	-	458.482.500,00	-	91,70	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	1.933.967.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus Kantor	1.933.967.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	26.500.000,00	305.315.000,00	-	26.450.000,00	215.847.500,00	99,81	70,70
Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Penganda)	-	190.000.000,00	-	-	187.550.000,00	-	98,71
Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Penangkapan Kantor	19.500.000,00	23.465.000,00	-	19.500.000,00	24.832.500,00	100,00	97,52
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya-Kamera CCTV	-	86.350.000,00	-	-	-	-	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya - Mesin Potong Rumpul	7.000.000,00	3.500.000,00	-	6.950.000,00	3.465.000,00	99,29	99,00
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	76.400.000,00	273.399.000,00	-	67.700.000,00	269.756.000,00	88,61	98,67
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	12.000.000,00	129.455.000,00	-	9.500.000,00	127.050.000,00	79,17	98,14
Belanja modal Pengadaan Penghias Rumah Tangga	20.000.000,00	126.000.000,00	-	19.800.000,00	125.370.000,00	99,00	99,50

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya-Audio	44.400.000,00	-	-	38.400.000,00	16,49	0,00
Belanja modal Pengadaan Tempat Tidur	-	17.944.000,00	-	-	-	96,61
Belanja modal Pengadaan Komputer	286.600.000,00	860.500.000,00	17.336.000,00	17.336.000,00	96,61	97,84
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	79.600.000,00	313.000.000,00	841.908.300,00	841.908.300,00	93,59	98,83
Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	13.500.000,00	17.100.000,00	309.333.200,00	309.333.200,00	99,26	33,33
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	18.000.000,00	110.400.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	96,00	97,96
Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	53.500.000,00	240.000.000,00	108.152.000,00	108.152.000,00	95,46	99,73
Belanja modal Pengadaan Software/aplikasi komputer	122.000.000,00	180.000.000,00	239.345.000,00	239.345.000,00	98,87	99,65
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	196.670.000,00	286.384.000,00	179.378.100,00	179.378.100,00	93,76	99,62
Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	80.270.000,00	107.549.000,00	285.302.200,00	285.302.200,00	97,94	99,85
Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	30.000.000,00	40.878.000,00	107.387.000,00	107.387.000,00	100,00	99,00
Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	55.000.000,00	66.604.000,00	40.469.000,00	40.469.000,00	85,42	99,56
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Asap Pejabat	22.000.000,00	71.353.000,00	66.310.200,00	66.310.200,00	92,73	99,70
Belanja modal Pengadaan Kursi Tunggal	9.400.000,00	-	71.136.000,00	71.136.000,00	89,36	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	-	159.580.000,00	-	116.578.000,00	-	73,05
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	-	159.580.000,00	-	116.578.000,00	-	73,05
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	8.400.000,00	74.650.000,00	72.215.000,00	72.215.000,00	96,43	96,74
Belanja modal Pengadaan System/Power Supply	8.400.000,00	74.650.000,00	72.215.000,00	72.215.000,00	96,43	96,74
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	748.000.000,00	431.731.000,00	431.731.000,00	86,62	57,72
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	748.000.000,00	431.731.000,00	431.731.000,00	86,62	57,72
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	748.000.000,00	431.731.000,00	431.731.000,00	86,62	57,72

Bengkalis, Juli 2019



KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Keberhasilan pencapaian kinerja dalam pendanaan pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.7 dimana belanja daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu lima tahun mengalami penurunan. Penurunan anggaran diakibatkan oleh pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis yang tidak mencapai target yang mengakibatkan terjadinya defisit sehingga dilakukannya rasionalisasi anggaran.

Oleh karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ke depan berupaya untuk memberi pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan melakukan beberapa langkah perbaikan dan penyempurnaan layanan :

1. Perbaikan mutu layanan melalui penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Review dan revisi regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah, seperti Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi, Kebijakan Pengelolaan Uang Daerah, Kebijakan Pengelolaan Bantuan Sosial, Hibah serta Bantuan Keuangan;
3. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka e-audit dengan BPK-RI, pelaporan keuangan daerah dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta pihak-pihak terkait lainnya;
4. Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pengelolaan keuangan melalui aspek spritual, pengetahuan dan kompetensi, yaitu dilakukan antara lain dengan penegasan komitmen bersama untuk mematuhi kode etik/aturan perilaku.



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur pengelola keuangan dan aset pemerintah Kabupaten Bengkalis merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Perkembangan regulasi pengelolaan keuangan yang berkembang secara dinamis menjadi tantangan dan sekaligus peluang dalam mengembangkan pelayanan keuangan daerah kepada seluruh stakeholders. Selain itu, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat harus di iringi dengan kualitas dan kepastian hukum atas seluruh produk layanan keuangan maupun pengelolaan aset yang dihasilkan.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut :

### **2.4.1. Tantangan**

1. perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat
2. implementasi penganggaran berbasis kinerja, penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah
3. implementasi akuntansi berbasis akrual;
4. kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
5. pelaksanaan e-audit dan monitoring pengelolaan kas daerah secara on-line oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
6. pengintegrasian sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan sistem informasi barang milik daerah;
7. tuntutan transparansi informasi keuangan dan aset daerah
8. inventarisasi aset yang belum optimal
9. realisasi belanja SKPD / rendahnya kapasitas aparatur SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

### **2.4.2. Peluang**

1. kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih bisa dikembangkan
2. pembentukan kelembagaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi SKPD yang mandiri, tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing);

3. pengembangan standar operasional dan prosedur dalam rangka pelayanan penyusunan anggaran, perbendaharaan, pelaporan keuangan, pengelolaan aset/barang milik daerah;
4. regulasi keuangan dan aset daerah serta penyusunan produk hukum daerah terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. kemajuan teknologi Informasi mendorong pengembangan SIPKD dan integrasi dengan SIMDA dan pelaporan berbasis IT dari SKPD;
6. kualitas penganggaran masih dapat diperbaiki dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja;
7. perbaikan dan penyederhanaan regulasi keuangan dan aset oleh pemerintah;
8. pengembangan website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai wujud akuntabilitas.

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis di hadapkan pada permasalahan-permasalahan yang di harapkan akan dapat diselesaikan selama periode pelaksanaan rencana strategis 2017-2021. Adapun permasalahan-permasalahan berdasarkan analisis adalah :

- a. belum terintegrasinya sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah dengan sistem informasi barang milik daerah;
- b. belum optimalnya pengelolaan dan inventarisasi aset daerah;
- c. kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah belum optimal;
- d. realisasi belanja SKPD / rendahnya kapasitas aparatur SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang di tetapkan untuk tahun 2016-2021 adalah : ***Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia.***

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas
2. mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumberdaya manusia untuk kemakmuran rakyat
3. mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat

Berdasarkan misi Kabupaten Bengkalis di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan misi ke-satu yaitu: **Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.**

Adapun rumusan tujuan dan sasaran dari RPJMD tahun 2016-2021 sebagai berikut:

**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bengkalis  
Tahun 2016 - 2021**

<b>Misi: Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas</b>			
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah.	Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bengkalis

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut:

<b>Misi 1</b>	<b>Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).</b>		
<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Program</b>
<b>Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Penataan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Menyiapkan Penggunaan sistem elektronik perencanaan, penganggaran dan aset yang terintegrasi dan terkendali dengan baik..	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Melakukan pembinaan terhadap penggunaan anggaran organisasi perangkat daerah.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

### 3.3 Analisis Renstra Kementerian Keuangandan Renstra BPKAD Provinsi Riau

#### 3.3.1 Renstra Kementerian Keuangan

Renstra kementerian keuangan merupakan gambaran secara makro dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan bila di lihat dari sudut

pandang SKPD di tataran Pemerintah Kabupaten Bengkalis. SKPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan aset pada tataran daerah dalam penyusunan akan menyelaraskan dengan renstra kementerian keuangan, sehingga dalam penyusunan renstra BPKAD Kabupaten Bengkalis salah satu acuan pokok yang digunakan adalah renstra kementerian keuangan.

Adapun Visi, Misi, dan Tujuan dari Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut: Visi Kementerian Keuangan adalah: **“Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”**.

Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan pengelola keuangan dan kekayaan negara adalah kementerian keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan mengelola kekayaan negara. Di percaya adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran di lakukan melalui mekanisme APBN. Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan.

**Misi :**

- o mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
- o menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
- o mengelola neraca keuangan pusat dengan resiko minimum;
- o memastikan dana pendapatan di distribusikan secara efisien dan efektif;
- o menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

**Tujuan :**

- o terjaganya kesinambungan fiskal;
- o optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;

- o pembangunan sistem penerimaan pegara pukan pajak (PNBK) yang handal, untuk optimalisasi penerimaan negara;
- o peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan transfer ke daerah;
- o peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
- o peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
- o kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan penguatan kelembagaan.

**Sasaran:**

1. untuk mencapai tujuan terjaganya kesinambungan fiskal, sasaran strategis yang diciptakan adalah:
  - meningkatkan tax ratio
  - terjaganya rasio utang pemerintah
  - terjaganya difisit anggaran
2. untuk mencapai tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai, sasaran strategis yang ditetapkan adalah:
  - penerimaan pajak negara yang optimal
  - penerimaan negara di sektor kepabeanan yang optimal
  - percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (custommers celarance), untuk mendukung upaya penurunan rata-rata dwelling time.
3. untuk mencapai tujuan pembangunan sistem penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) yang handal, untuk optimalisasi penerimaan negara, sasaran yang ditetapkan adalah sistem pelayanan PNBP yang optimal.
4. untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan transfer ke daerah, sasaran strategis yang ditetapkan adalah:
  - perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas
  - hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan.

5. untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran, sasaran strategis yang ditetapkan.
6. untuk mencapai tujuan peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan, sasaran strategis yang ditetapkan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection, serta melaksanakan fungsi sebagai border management.
7. untuk mencapai tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan goernance dan penguatan kelembagaan, sasaran strategis yang ditetapkan adalah:
  - organisasi yang fit for purposes.
  - SDM yang kompetitif
  - sistem Informasi sanagement yang terintegrasi
  - peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian.

### **3.3.2 Renstra BPKAD Provinsi Riau**

Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau menjadi salah satu acuan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan Renstra BPKAD, hal tersebut guna menjamin terjadinya harmonisasi dan sinkrosisasi dalam pengelolaan keuangan. Adapun Visi, Misi, dan Tujuan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

#### **Visi**

***"Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Pemerintah Provinsi Riau yang Baik, Profesional, dan Handal"***

#### **Misi**

- o meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
- o meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, memiliki kepastian hukum dan kepastian nilai dan berbasis teknologi informasi;
- o melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten/kota

## **Tujuan**

Tujuan strategis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

- o meningkatnya kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
- o meningkatnya pelayanan prima kepada pemangku kepentingan (stakeholders);
- o meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset berbasis teknologi informasi;
- o terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel serta memiliki kepastian hukum dan kepastian nilai;
- o meningkatnya pembinaan dan fasilitasi keuangan dan aset daerah kabupaten/kota;
- o meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten/Kota.

## **Sasaran**

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut:

- meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
- meningkatkan pelayanan prima;
- meningkatkan penganggaran berbasis kinerja;
- meningkatkan pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah berbasis teknologi informasi yang efektif dan efisien;
- meningkatkan kecepatan dan ketepatan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis teknologi informasi;
- meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- terfasilitasinya pengelolaan keuangan dan aset daerah kab/kota;
- meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah kab/kota.



### **3.4 Analisis Terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD.**

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang efektif akan menghasilkan informasi yang sangat penting bagi keberhasilan dalam pengambilan keputusan karena dengan demikian diperoleh pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan ancaman yang dihadapi.

Dengan kata lain personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis harus dapat mengantisipasi sesegera mungkin untuk menghindari dari menjadi korban lingkungan negatif yang kurang mendukung dalam pencapaian visi dan misi saat ini. Selain itu personil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis harus dapat menangkap peluang yang ada agar menjadi sesuatu yang berguna untuk kemajuan dan perbaikan bagi BPKAD. Analisis terhadap lingkungan organisasi strategis sangat berpengaruh terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bengkalis, hasil penilaian dapat memberikan informasi yang sangat penting bagi kelangsungan dan kesuksesan organisasi.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

#### 4.1. Visi dan Misi

**Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Profesional untuk Mendukung Kabupaten Bengkalis sebagai Negeri Maju dan Makmur.**

**Misi :**

- mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu
- mewujudkan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan
- mewujudkan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan
- mewujudkan SDM yang profesional dan berkinerja

#### 4.2. Tujuan dan Sasaran

**4.2.1 Tujuan pertama: meningkatkan kualitas penganggaran sesuai peraturan perundangan, dengan sasaran dan indikator:**

- Meningkatnya kualitas penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku, dengan indikator:
  - Lamanya waktu penyusunan RAPBD
  - Persentase kesesuaian PPAS dengan RKPD

**4.2.2 Tujuan kedua: terwujudnya penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dengan sasaran dan indikator:**

- Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dengan Indikator:
  - Rata-rata waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu
  - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan indikator
  - Persentase peningkatan penyelesaian laporan keuangan daerah

**4.2.3 Tujuan ketiga: terwujudnya penatausahaan aset daerah yang baik, dengan sasaran dan indikator:**

- Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan

Perundangan, dengan indikator:

- Persentase aset yang tercatat dalam system secara update
- Persentase aset yang digunakan (berfungsi)sesuai peruntukannya

**4.2.4 Tujuan keempat: terwujudnya lembaga yang berkualitas dan berkinerja tinggi,** dengan sasaran dan indikator:

- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja lembaga, dengan Indikator:
  - Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD
  - Persentase temuan Inspektorat / BPK yang Ditindaklanjuti

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD 2017-2021**

Visi: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Profesional untuk Mendukung Kabupaten Bengkulu sebagai Negeri Maju dan Makmur										
Misi/Tujuan	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun					Target Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Misi 1: Mewujudkan Anggaran Daerah yang Berbasis Kinerja dan Tepat Waktu</b>										
Meningkatkan kualitas Penganggaran Sesuai Peraturan Perundangan	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	Meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	210 Hari	210 Hari	180 Hari	180 Hari	180 Hari	180 Hari	180 Hari
	Persentase kesesuaian PPAS dengan RKPD		Persentase kesesuaian PPAS dengan RKPD	75%	85%	90%	95%	100%	100%	100%
<b>Misi 2: Mewujudkan Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan</b>										
Terwujudnya Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	Rata-rata waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan	Rata-rata waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	-	3 Hari	2.5 Hari	2 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	76%	77%	78%	79%	80%	80%
	Persentase Peningkatan Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Misi 3: Mewujudkan Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangan</b>										
Terwujudnya Penatausahaan Aset Daerah yang Baik	Persentase Aset yang tercatat dalam sistem secara update	Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Aset yang tercatat dalam sistem secara update	70%	72%	74%	76%	78%	80%	80%
	Persentase aset yang digunakan (berfungsi) sesuai peruntukannya		Persentase aset yang digunakan (berfungsi) sesuai peruntukannya	60%	62%	64%	66%	68%	70%	70%
<b>Misi 4: Mewujudkan SDM yang Profesional dan Berkinerja</b>										
Terwujudnya Lembaga yang Berkualitas dan Berkinerja Tinggi	Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga	Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD	-	50%	60%	70%	80%	90%	90%
			Persentase Temuan Inspektorat / BPK yang Ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, dapat dilakukan dengan menggunakan analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal diawali dengan identifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian dilanjutkan dengan analisis eksternal yang meliputi identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III.

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1.

## 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Tahun 2017 – 2021

**Visi: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Profesional untuk Mendukung Kabupaten Bengkalis sebagai Negeri Maju dan Makmur**

### **Misi 1: Mewujudkan Anggaran Daerah yang Berbasis Kinerja dan Tepat Waktu**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Penganggaran Sesuai Peraturan Perundangan	Meningkatnya Kualitas Penyusunan RAPBD Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Penataan Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Menyiapkan penggunaan sistem elektronik perencanaan, penganggaran dan aset yang terintegrasi dan terkendali dengan baik.
			Melakukan pembinaan terhadap penggunaan anggaran organisasi perangkat daerah.

### **Misi 2: Mewujudkan Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan**

Terwujudnya Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan Yang Berlaku	Meningkatnya Layanan Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan Perundangan	Penataan Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Menyiapkan penggunaan sistem elektronik perencanaan, penganggaran dan aset yang terintegrasi dan terkendali dengan baik.
	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Melakukan pembinaan terhadap penggunaan anggaran organisasi perangkat daerah.

### **Misi 3: Mewujudkan Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangan**

Terwujudnya Penatausahaan Aset Daerah Yang Baik	Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangan	Penataan Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Menyiapkan penggunaan sistem elektronik perencanaan, penganggaran dan aset yang terintegrasi dan terkendali dengan baik.
			Melakukan pembinaan terhadap penggunaan anggaran organisasi perangkat daerah.

### **Misi 4: Mewujudkan SDM yang Profesional dan Berkinerja**

Terwujudnya Lembaga Yang Berkualitas Dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga	Meningkatkan Kapasitas SDM bidang pengelolaan keuangan dan aset.	Meningkatkan kapasitas SDM bidang pengelolaan keuangan dan aset .
--	--	--	---

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR**  
**KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN**  
**INDIKATIF**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Di samping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1.



Tabel 4.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator  
BPKAD Kabupaten Sangkalis 2017-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2016 - 2021)	Unit Penanggung Jawab		
								2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	Terwujudnya Lembaga yang Berkemampuan dan Berkinerja Tinggi	Meningkatkannya Reputasi dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga	Predikat Ythabai SAMP BPKAD	03.01.01.001	Program Revisi Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	88,00%	90,00%	4.197.980.546	98,00%	4.782.027.828	98,00%	4.637.942.088	98,00%	4.981.494.088	100%	7.193.494.088	100%	21.617.888.428	BPKAD			
1			Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	03.01.01.001	Program Revisi Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	2000 Surat	2000 Surat	307.410.000	2000 Surat	307.410.000	2000 Surat	307.410.000	2000 Surat	307.410.000	2000 Surat	307.410.000	2000 Surat	1.747.301.000	BPKAD			
2			Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	03.01.01.002	Program Revisi Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	3 item	3 item	900.000.000	3 item	900.000.000	3 item	1.000.000.000	3 item	1.000.000.000	3 item	1.000.000.000	1,5 item	4.249.400.000	BPKAD			
3			Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	03.01.01.003	Program Revisi Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	5 item	5 item	800.000.000	5 item	800.000.000	5 item	1.000.000.000	5 item	1.000.000.000	7 item	2.000.000.000	28 item	7.750.017.700	BPKAD			
4			Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	03.01.01.004	Program Revisi Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	20 item	20 item	70.000.000	20 item	70.000.000	20 item	100.000.000	20 item	100.000.000	20 item	100.000.000	80 item	435.000.000	BPKAD			
5			Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	03.01.01.005	Program Revisi Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	20 item	20 item	305.441.400	20 item	305.441.400	20 item	307.200.000	20 item	307.200.000	30 item	397.200.000	168 item	1.662.982.375	BPKAD			
6			Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	03.01.01.006	Program Revisi Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	40 item	40 item	388.698.395	40 item	388.698.395	40 item	476.035.085	40 item	476.035.085	40 item	476.035.085	200 item	2.080.724.050	BPKAD			
7			Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	03.01.01.007	Program Revisi Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	20 item	20 item	76.463.000	20 item	76.463.000	20 item	200.000.000	20 item	200.000.000	20 item	200.000.000	64 item	922.984.500	BPKAD			
8			Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	03.01.01.008	Program Revisi Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	20 item	20 item	80.000.000	20 item	80.000.000	20 item	70.000.000	20 item	70.000.000	20 item	106.652.000	10,5 item	432.600.000	BPKAD			
9			Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	03.01.01.009	Program Revisi Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	30 item	30 item	90.000.000	30 item	90.000.000	30 item	50.000.000	30 item	50.000.000	30 item	50.000.000	11,5 item	410.000.000	BPKAD			
10			Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	03.01.01.010	Program Revisi Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	800 item	800 item	1.000.000.000	800 item	1.000.000.000	800 item	365.000.000	800 item	365.000.000	800 item	365.000.000	4.000 item	1.272.350.000	BPKAD			
11			Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	03.01.01.011	Program Revisi Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	100 item	100 item	1.000.000.000	100 item	1.000.000.000	100 item	1.000.000.000	100 item	1.000.000.000	100 item	1.000.000.000	1.600 item	4.870.000.000	BPKAD			
12			Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	03.01.01.012	Program Revisi Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	6 item	6 item	250.000.000	6 item	250.000.000	6 item	250.000.000	6 item	250.000.000	12 item	250.000.000	44 item	1.249.400.000	BPKAD			
13			Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	03.01.01.013	Program Revisi Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	2 item	2 item	58.400.000	2 item	58.400.000	2 item	58.400.000	2 item	58.400.000	2 item	58.400.000	10 item	292.000.000	BPKAD			
14			Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	03.01.01.014	Program Revisi Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	3000 item	3000 item	476.035.085	3000 item	476.035.085	3000 item	450.000.000	3000 item	450.000.000	14000 item	490.000.000	31.000 item	2.246.624.000	BPKAD			
15			Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	03.01.01.015	Program Revisi Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kewajiban dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan	30 item	30 item	150.000.000	30 item	150.000.000	30 item	150.000.000	30 item	150.000.000	30 item	150.000.000	60 item	300.000.000	BPKAD			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Kendali Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Pemanggang Javab			
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2014 - 2021)					
								TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)		TARGET	Rp (Juta)	
16				03 01 01 000	Publikasi Informasi Pembangunan	Persentase peningkatan pengalihan masyarakat ke Unit OPD BPKAD Kab. Bangkalis dalam 1 tahun	90,8%	27.294.837.000	96,0%	15.145.797.000	98,5%	23.707.487.988	99,0%	31.824.447.885	100%	38.104.818.485	100%	150.000.000	Media	295.000.000	BPKAD		
17				03 01 01 000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Pengelola Barang	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas pada pengelola dalam 1 tahun												300.000.000	10 Unit	630.000.000	BPKAD		
II					Program Penghinaan Prasana dan Prasana Aparatur	Pemeliharaan Perawatan dan sarana pemeliharaan	81,4%	27.294.837.000	96,0%	15.145.797.000	98,5%	23.707.487.988	99,0%	31.824.447.885	100%	38.104.818.485	100%	150.000.000	Media	295.000.000	BPKAD		
18				03 01 02 003	Sembayun Gedung	Resepensi Sembayun Gedung 1 juta/BPKAD												7.500.000.000	1 Paket	15.100.000.000	BPKAD		
19				03 01 02 004	Sembayun Gedung	Jumlah sarana transportasi yang di sediakan dalam 1 tahun	93 unit	15.885.215.000	18 unit	12.724.093.485	60 unit	12.744.093.485	49 unit	12.744.093.485	256 unit	65.777.990.455			490.000.000	6 Item	1.392.400.000	BPKAD	
20				03 01 02 004	Sembayun Gedung	Jumlah pengadaan perengkapan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	15 unit	200.000.000	3 item	185.000.000	6 item	470.000.000	6 item	470.000.000	18 item	1.392.400.000			490.000.000	6 Item	1.392.400.000	BPKAD	
21				03 01 02 004	Sembayun Gedung	Jumlah pengadaan Perbaikan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	10 item	15.400.000	4 item	610.045.900	5 item	660.000.000	5 item	660.000.000	24 item	21.664.445.900			700.000.000	5 item	21.664.445.900	BPKAD	
22				03 01 02 004	Sembayun Gedung	Jumlah pengadaan Meubeler gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	10 unit	179.000.000	13 item	420.054.100	13 item	420.054.100	13 item	420.054.100	39 item	1.459.108.200			440.000.000	13 item	1.459.108.200	BPKAD	
23				03 01 02 004	Sembayun Gedung	Jumlah pengadaan Meubeler gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	1 unit	1.957.927.000							1 unit	1.953.927.000				1 Unit	1.953.927.000	BPKAD	
24				03 01 02 004	Sembayun Gedung	Jumlah Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	1 unit	303.200.000	1 unit	540.000.000	1 unit	700.000.000	1 unit	700.000.000	5 unit	3.066.000.000			740.000.000	1 unit	3.066.000.000	BPKAD	
25				03 01 02 004	Sembayun Gedung	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan dalam 1 Tahun	4 unit	465.500.000	8 unit	380.500.000	8 unit	380.500.000	8 unit	380.500.000	40 unit	2.027.500.000			400.500.000	10 unit	2.027.500.000	BPKAD	
26				03 01 02 008	Sembayun Gedung	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Kabupaten yang diadakan dalam 1 tahun	10 kor	20.000.000	10 kor	370.000.000	15 kor	370.000.000	15 kor	370.000.000	60 Kor	1.635.000.000			370.000.000	15 kor	1.635.000.000	BPKAD	
27				03 01 02 040	Sembayun Gedung	Jumlah ruangan yang dihibak dalam 1 tahun	6 Ruang	50.500.000	8 Ruang	1.400.000.000	8 Ruang	1.400.000.000	8 Ruang	1.400.000.000	36 Ruang	5.724.000.000			1.300.000.000	8 Ruang	5.724.000.000	BPKAD	
28				03 01 02 054	Sembayun Gedung	Jumlah takas Gedung yang dibangun	3 unit	7.338.760.000							5 unit	1.500.000.000			1.300.000.000	10 Unit	1.500.000.000	BPKAD	
29				03 01 02 054	Sembayun Gedung	Jumlah pembangunan takas Gedung yang dibangun	3 unit	7.338.760.000													41 Unit	7.338.760.000	BPKAD
30				03 01 02 054	Sembayun Gedung	Jumlah pengadaan Peralatan Kabin yang diadakan dalam 1 tahun	13 item	161.768.500	13 item	2.500.000.000	23 item	2.500.000.000	26 item	2.500.000.000	75 item	8.161.768.000			2.500.000.000	26 item	8.161.768.000	BPKAD	
31				03 01 02 054	Sembayun Gedung	Jumlah pengadaan Meubeler Kabin yang diadakan dalam 1 tahun	13 item	246.049.000	13 item	1.819.556.500	13 item	1.800.000.000	13 item	1.800.000.000	52 item	5.726.036.500			1.840.000.000	13 item	5.726.036.500	BPKAD	
32				03 01 02 094	Pengadaan barang	Jumlah interior ruang kerja kantor yang diadakan dalam 1 tahun			1 Paket	2.500.000.000	1 Paket	2.500.000.000	1 Paket	2.500.000.000	1 Paket	7.560.000.000			2.540.000.000	1 Paket	7.560.000.000	BPKAD	
III					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemeliharaan pegawai yang mendapat kompetensi sesuai bingkainya	80,28%	410.000.000	85,80%	140.000.000	98,00%	800.000.000	100%	600.000.000	100%	400.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	2.490.000.000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kendali Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kendali Kinerja pada Akhir RPJMD (2014 - 2021)	Unit Penanggung Jawab
								2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp (Juta)		
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
33				03.01.05.001	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		40 Orang	610.000.000	100 Orang	140.000.000	200 Orang	500.000.000	290 Orang	600.000.000	290 Orang	620.000.000	920 Orang	2.490.000.000	8PKAD	
IV					Program Pendidikan dan Pelatihan	Penyediaan sarana dan prasarana	97,15%	97,8 %	897.795.200	98,2 %	789.401.100	98,6%	1.480.000.000	99,5%	1.740.000.000	100%	2.085.000.000	100%	6.834.197.100		
34				03.01.05.002	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah laporan tahunan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun		1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	340.000.000	5 Dokumen	1.234.148.600	8PKAD	
35				03.01.05.003	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah laporan tahunan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun		1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	116.658.800	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	600.000.000	2 Dokumen	700.000.000	10 Dokumen	1.869.356.050	8PKAD	
36				03.01.05.004	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah laporan tahunan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun		1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	409.354.800	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	840.000.000	5 Laporan	3.325.652.450	8PKAD	
37				03.01.05.005	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah laporan tahunan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun		1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	2 Laporan	405.000.000	8PKAD	
V	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Peraturan Perundang-undangan		Program peningkatan dan pembinaan keorganisasian	Opini Audit terhadap Daerah Persepsi Keadilan dan Keakuratan PPAK dan RKPD	90,5%	16.942.108.350	74,25%	24.048.770.900	97,5 %	28.237.246.171	98,6%	53.027.817.000	100%	57.178.889.100	100%	180.449.035.101			
38				03.01.05.006	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah laporan tahunan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun		1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	4 Dokumen	250.000.000	8PKAD	
39				03.01.05.007	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah laporan tahunan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun		1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	10 Perbul	670.000.000	8PKAD	
40				03.01.05.008	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah laporan tahunan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun		1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	5 Dokumen	835.087.000	8PKAD	
41				03.01.05.009	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah laporan tahunan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun		1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	9 Dokumen	17.699.372.100	8PKAD	
42				03.01.05.010	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah laporan tahunan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun		1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	6 Dokumen	5.602.393.300	8PKAD	
43				03.01.05.011	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah laporan tahunan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun		1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	4 Dokumen	1.474.525.300	8PKAD	
44				03.01.05.012	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah laporan tahunan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun		1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	4 Dokumen	1.847.616.700	8PKAD	
45				03.01.05.013	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah laporan tahunan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun		1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1000 Orang	1.922.909.600	8PKAD	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2016 - 2021)	Unit Pemangku Jawab		
							2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
44				03 01 17 015	Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis yang mengikuti Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 1 tahun	45 orang	326.060.000	45 orang	326.060.000	45 orang	326.060.000	45 orang	500.000.000	75 orang	550.000.000	210 orang	1.702.120.000	BPJAD			
47				03 01 17 024	Penyediaan jasa Administrasi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan belanja SKPD dalam 1 tahun	1 Laporan	290.830.900	1 Laporan	149.997.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	450.000.000	4 Laporan	1.290.827.900	BPJAD			
48				03 01 05 026	Rapat Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta rapat kerja dalam 1 tahun	50 orang	72.694.200	50 orang	72.694.200	50 orang	600.000.000	50 orang	600.000.000	50 orang	450.000.000	200 orang	995.388.400	BPJAD			
49				03 01 17 033	Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah	Jumlah peserta yang mengikuti pengelolaan keuangan daerah dalam 1 tahun	40 orang	1.194.515.340	60 orang	498.000.000	60 orang	498.000.000	60 orang	518.000.000	80 orang	520.000.000	300 orang	3.228.515.340	BPJAD			
50				03 01 17 034	Penyusunan DPA/DPPA SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pedoman penyusunan APBD dalam 1 tahun	2 Dokumen	832.721.700	2 Dokumen	700.000.000	2 Dokumen	900.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000	8 Dokumen	3.432.721.700	BPJAD			
51				03 01 17 034	Sosialisai Pedoman Penyusunan APBD	Jumlah peserta sosialisasi pedoman penyusunan APBD	120 orang	303.991.200	120 orang	303.991.200	120 orang	470.000.000	120 orang	470.000.000	120 orang	500.000.000	480 orang	1.577.982.400	BPJAD			
52				03 01 17 066	Peningkatan sistem informasi keuangan daerah	Jumlah sistem informasi keuangan yang terintegrasi dengan menggunakan aplikasi SKPD pada seluruh SKPD di Kab. Bangkalis	1 Aplikasi	1.679.987.100	1 Aplikasi	1.679.987.100	1 Aplikasi	1.800.000.000	1 Aplikasi	1.800.000.000	1 Aplikasi	1.900.000.000	5 Aplikasi	8.916.752.950	BPJAD			
53				03 01 17 118	Penyediaan Informasi Keuangan Daerah	Jumlah website	1 Website	481.938.500	1 Website	481.938.500	1 Website	220.000.000	1 Website	220.000.000	1 Website	240.000.000	3 Website	941.938.500	BPJAD			
54				03 01 17 120	Penyusunan dan Desiminsi Regulasi Keuangan Daerah	Jumlah Perub tentang keuangan daerah yang tersusun dalam 1 tahun	4 Dokumen	406.642.500	6 Dokumen	801.739.500	6 Dokumen	1.000.000.000	8 Dokumen	1.000.000.000	8 Dokumen	1.020.000.000	28 Dokumen	4.030.121.500	BPJAD			
55				03 01 17 122	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perda tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun dalam satu tahun	1 Dokumen	742.418.600	1 Dokumen	444.828.200	1 Dokumen	464.828.200	1 Dokumen	464.828.200	1 Dokumen	484.828.200	5 Dokumen	2.581.731.400	BPJAD			
56				03 01 17 126	Peningkatan kapasitas Pencapaian Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah super administrator Rumpus SKPD yang mendapatkan pelatihan	35 orang	495.000.000	35 orang	495.000.000	35 orang	516.000.000	28 orang	516.000.000	28 orang	600.000.000	80 orang	2.107.000.000	BPJAD			
57				03 01 17 127	Koordinasi Bidang Anggaran	Jumlah koordinasi yang terlaksana dalam 1 tahun	40 kali	446.147.200	40 kali	446.147.200	40 kali	600.000.000	40 kali	600.000.000	40 kali	650.000.000	160 kali	2.142.294.400	BPJAD			
58				03 01 17 130	Asistensi Penyusunan RKA SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti asistensi penyusunan RKA dalam 1 tahun	100 orang	159.429.500	100 orang	159.429.500	100 orang	300.000.000	100 orang	300.000.000	100 orang	350.000.000	400 orang	968.921.500	BPJAD			
59				03 01 17 130	Penyusunan KJA - PPAS	Jumlah rancangan KJA dan PPAS	1 Laporan	677.202.500	1 Laporan	677.202.500	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	900.000.000	4 Laporan	3.104.465.000	BPJAD			
61	Terwujudnya Penatubuhan Keuangan Daerah yang ditunjukkan dengan tercapainya Indeks Keselamatan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya layanan penatubuhan keuangan sesuai pembangunan	Rata-rata waktu penyelesaian 3PD yang ditanyakan lengkap dan tuntas	03 01 17 031	Pelaksanaan Pembinaan Analisis dan Evaluasi SPJ SKPD	Jumlah SKPD yang mengikuti SPJ tepat waktu dalam 1 tahun	1 Laporan	677.202.500	1 Laporan	677.202.500	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	900.000.000	4 Laporan	3.104.465.000	BPJAD			
62				03 01 17 084	Bimbingan teknis pelaksanaan belanja tidak langsung bagi bendahara	Jumlah peserta Bimtek yang Menemani Penatubuhan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 1 Tahun	100 orang	695.000.000	200 orang	450.000.000	200 orang	1.300.000.000	140 orang	1.300.000.000	140 orang	1.500.000.000	320 orang	3.945.000.000	BPJAD			
63				03 01 17 117	Koordinasi, Sinkronisasi dan Revalidasi Data Penatubuhan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Revalidasi Data Penatubuhan Kas dalam 1 Tahun	1 Dokumen	233.049.950	13 OPD	431.135.500	13 OPD	500.000.000	13 OPD	500.000.000	13 OPD	600.000.000	39 OPD	1.764.183.450	BPJAD			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kandisi Kinerja RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kandisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2016 - 2021)	Unit Pemangung Jawab
								2017		2018		2019		2020		2021					
								TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)		
64				03 01 17 129	Penyusunan Laporan dan Penyelenggaraan Galangan Unjuk PFK dan Luran Jaminan Kesehatan Nasional Bagi PPUFN 1 Tahun	Jumlah laporan penyelenggaraan galangan Unjuk PFK dan Luran Jaminan Kesehatan Nasional bagi PPUFN dalam 1 Tahun		1	330.297.800	1 Laporan	485.911.600	1 Laporan	485.911.600	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	800.000.000	4 Laporan	2.692.121.000	BPKAD	
65				03 01 17 130	Rekonsiliasi data penerimaan Kas	Jumlah data penerimaan Kas			331.175.500	1 Laporan				470.000.000	1 Laporan	500.000.000	3 Laporan	1.301.175.500	BPKAD		
66				03 01 17 136	Penyusunan Laporan Realisasi SP2D	Jumlah laporan realisasi SP2D/BKU BLUD dalam 1 Tahun			350.389.800	1 Laporan	547.115.700	1 Laporan	800.000.000	2 Laporan	900.000.000	5 Laporan	2.597.505.500	BPKAD			
67				03 01 17 137	Penerbitan surat SKPP kelengkapan pembenturan pembayaran gaji kepada PNS pindah Tugas, Penstun dan Meninggal	Jumlah laporan surat SKPP kelengkapan pembenturan pembayaran gaji kepada PNS pindah Tugas, Penstun dan Meninggal			304.723.600	1 Laporan	304.723.600	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	600.000.000	4 Laporan	1.709.447.600	BPKAD			
68				03 01 17 139	Koordinasi Bidang Perencanaan	Jumlah koordinasi yang terencana dalam 1 (satu) tahun			324.653.400	40 kali	324.653.400	40 kali	600.000.000	40 kali	700.000.000	160 kali	1.949.306.800	BPKAD			
69				03 01 17 160	Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	Jumlah SP2D dan Daftar Pengaji			500.000.000	26000 SP2D	500.000.000	26000 SP2D	850.000.000	26000 SP2D	900.000.000	26.000 SP2D	2.250.000.000	BPKAD			
70				03 01 17 121	Smblngan Teknis Pengelolan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah Smblngan Teknis Pengelolan dan Penatausahaan Keuangan Daerah dalam 1 Tahun			600.000.000	60 Orang	600.000.000	70 Orang	800.000.000	70 Orang	900.000.000	140 Orang	2.300.000.000	BPKAD			
71				03 01 17 162	Peningkatan Kapasitas Penatausahaan Bendahara Umum Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengelolan Bendahara Umum Daerah dalam 1 Tahun			420.000.000	40 Orang	420.000.000	60 Orang	650.000.000	60 Orang	750.000.000	160 Orang	1.820.000.000	BPKAD			
72				03 01 17 163	Penelitian, Analisis dan Evaluasi Pengelolan Keuangan Daerah	Jumlah laporan atau Analisis dan Evaluasi Pengelolan Keuangan Daerah dalam 1 Tahun			335.870.471	4 Dokumen	335.870.471	4 Dokumen	900.000.000	4 Dokumen	950.000.000	12 Dokumen	2.185.870.471	BPKAD			
73				03 01 17 000	Koordinasi Pengelolan Dana Transfer	Jumlah koordinasi Pengelolan Dana Transfer							350.000.000	20 kali	400.000.000	40 kali	750.000.000	BPKAD			
74				03 01 17 000	Peningkatan Pelaksanaan Transaksi non tunai (NT)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan non tunai dalam 1 Tahun							300.000.000	60 Orang	1.500.000.000	800 Orang	3.100.000.000	BPKAD			
75	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			03 01 17 010	Penyusunan Data Dasar dalam Rangka Optimalisasi Dana Perimbangan	Jumlah laporan data dasar perimbangan kabupaten/bektae dalam 1 Tahun			890.988.100	1 Laporan	890.988.100	1 Laporan	1.000.000.000	1 Laporan	1.000.000.000	4 Laporan	3.801.976.200	BPKAD			
76				03 01 17 011	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penangungjawab pelaksanaan APBD	Jumlah Raperda tentang peraturan daerah tentang penangungjawab pelaksanaan APBD			264.397.700	1 Dokumen	264.397.700	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	1.756.783.770	BPKAD			
77				03 01 17 043	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penangungjawab pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang penangungjawab pelaksanaan APBD			286.908.000	1 Dokumen	286.908.000	1 Dokumen	320.602.800	1 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	1.947.463.120	BPKAD			
78				03 01 17 075	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan			3.133.152.900	68 orang	3.133.152.900	68 orang	3.500.000.000	70 orang	3.800.000.000	325 Orang	16.989.073.400	BPKAD			
79				03 01 17 119	Persiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD	Jumlah laporan keuangan dan Pengawasan PPK BLUD dalam 1 tahun			293.387.900	1 Laporan	293.387.900	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	301.566.000	5 Laporan	1.475.097.100	BPKAD			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Kendali Kinerja Awal RP JMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggung Jawab		
								2017		2018		2019		2020		2021		Kendali Kinerja pada Akhir RP JMD (2016 - 2021)				
								TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)			
96				03 01 17 107	Pendataan dan perencanaan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan		196.374.800	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	350.000.000	345.000.000	345.000.000	3 Dokumen	3 Dokumen	891.374.800	BPKAD
97				03 01 17 112	Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milk Daerah	Jumlah laporan tentang sistem pengelolaan barang milk daerah		564.048.400	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	189.998.000	169.998.000	189.998.000	1 Dokumen	4 Dokumen	1.074.042.400	BPKAD
98				03 01 17 141	Pengamanan dan pengawasan aset milk daerah	Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan aset milk daerah dalam 1 tahun		-	1 Laporan	649.450.100	1 Laporan	649.450.100	1 Laporan	649.450.100	1 Laporan	689.450.100	689.450.100	4 Laporan	4 Laporan	2.657.800.400	BPKAD	
99				03 01 17 142	Pemeliharaan Jaringan SIMDA BMD	Jumlah aplikasi SIMDA BMD		218.800.000	1 Aplikasi	190.000.000	1 Aplikasi	189.968.000	1 Aplikasi	500.000.000	1 Aplikasi	229.968.000	1.328.736.000	5 Aplikasi	5 Aplikasi	1.328.736.000	BPKAD	
100				03 01 17 000	Pemeliharaan jaringan SIPKD	Jumlah aplikasi SIPKD		-	-	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	550.000.000	550.000.000	550.000.000	5 Aplikasi	5 Aplikasi	1.050.000.000	BPKAD
101				03 01 17 143	Kecamatan Bidang Ase	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun		-	40 Kali	222.547.800	40 Kali	222.547.800	40 Kali	450.000.000	40 Kali	500.000.000	1.395.095.600	160 Kali	160 Kali	1.395.095.600	BPKAD	
102				03 01 17 058	Workshop pengelolaan barang milk daerah	Terdapatnya pertemuan aplikasi SIMDA barang milk daerah tercapaian		319.628.700	-	-	-	-	-	-	145 Orang	565.000.000	545.000.000	565.000.000	145 Orang	435 Orang	1.429.628.700	BPKAD
103				03 01 17 109	Bimbingan teknis penyaluran aset daerah	Penyuluhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun		345.910.000	85 Orang	525.000.000	85 orang	525.000.000	85 orang	720.000.000	76 orang	1.044.628.700	3.160.538.700	340 Orang	340 Orang	3.160.538.700	BPKAD	
104				03 01 17 136	Bimbingan teknis pengurusan barang SKPD	Jumlah peserta bimbingan		-	-	-	-	-	-	30 Orang	320.000.000	300.000.000	320.000.000	65 Orang	65 Orang	825.910.000	BPKAD	
105				03 01 17 157	Inventarisasi Barang Milk Daerah	Jumlah laporan barang milk daerah penyaluran Kabupaten Bengkalis yang terusun dalam 1 tahun		-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	400.000.000	400.000.000	450.000.000	3 Dokumen	3 Dokumen	1.150.000.000	BPKAD
106				03 01 17 000	Rekonsiliasi Data Barang Milk Daerah	Jumlah barang milk daerah yang dapat direkonsiliasi dalam 1 (satu) tahun		-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	390.000.000	390.000.000	390.000.000	2 Laporan	2 Laporan	790.000.000	BPKAD
107				03 01 17 000	Sosialisasi tentang pengelolaan dan penyaluran barang milk daerah	Peningkatan pemahaman aparatur pengelola barang milk daerah terhadap stock opname dan penyusunan BMD		-	-	-	-	-	-	90 Orang	600.000.000	600.000.000	530.000.000	180 Orang	180 Orang	1.130.000.000	BPKAD	
108				03 01 17 000	Penyusunan Sistem Prosedur Pengelolaan Barang Milk Daerah	Jumlah Peraturan Bupati tentang pengelolaan barang milk daerah yang dapat disusun dalam 1 (satu) tahun		-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	700.000.000	670.000.000	700.000.000	6 Dokumen	6 Dokumen	1.370.000.000	BPKAD	
109				03 01 17 000	Penilaian Barang Milk Daerah	Jumlah aset yang menjadi LHP BPK untuk dilakukan penilaian dalam 1 (satu) tahun		-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	550.000.000	550.000.000	550.000.000	6 Dokumen	6 Dokumen	1.050.000.000	BPKAD	

Juli 2019  
 Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Kabupaten Bengkalis

**DIJILAH**  
 48.644.971.678    91,85%    48.644.137.420    99,00%    60.447.261.541    99,28%    92.873.258.070    100,00%    100.138.774.870    100,00%    300.197.918.881

**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja BPKAD Kabupaten Bengkalis sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021.

Adapun indikator kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir RPJMD
			Ke 1	Ke 2	Ke 3	Ke 4	Ke 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	210 hari	210 hari	180 hari	180 hari	180 hari	180 hari	180 hari
2	Persentase kesesuaian PPAS dengan RKPD	75%	85%	90%	95%	100%	100%	100%
3	Rata-rata waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	-	3 Hari	2.5 Hari	2 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	76%	77%	78%	79%	80%	80%
5	Persentase Peningkatan Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6	Persentase Aset yang tercatat dalam sistem secara update	70%	72%	74%	76%	78%	80%	80%
7	Persentase aset yang digunakan (berfungsi) sesuai peruntukannya	60%	62%	64%	66%	68%	70%	70%
8	Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD	-	50%	60%	70%	80%	90%	90%
9	Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis adalah merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis adalah merupakan penjabaran program RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tujuan penyusunan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Dengan disusunnya RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Renja dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA);
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

RENSTRA BPKAD ini hendaknya dapat dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BPKAD diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2017-2021 dengan baik dan benar;
2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA PD, RENJA-SKPD, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh BPKAD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA SKPD diperlukan adanya :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA BPKAD.

Bengkalis, Juli 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS



AULIA, S.Pi, MT  
Pembina Tk. I

NIP. 19701109 199903 1 005